



DUTA BESAR RI – TASHKENT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anak Agung Gde Alit Santhika
Jabatan : Duta Besar RI untuk Tashkent

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Retno L.P. Marsudi
Jabatan : Menteri Luar Negeri

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tashkent, 29 Januari 2016

Pihak Kedua



Retno L.P. Marsudi

Pihak Pertama



Anak Agung Gde Alit Santhika
Duta Besar LBBP

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
DUTA BESAR RI - TASHKENT**

No. (1)	SASARAN (2)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (3)	TARGET (4)
1.	Menguatnya peran Perwakilan RI dalam mendukung diplomasi <i>maritime</i> dan perbatasan/pengembangan infrastruktur poros maritime Indonesia/kerja sama bilateral dan isu-isu global	Persentase rekomendasi hasil kajian komprehensif Perwakilan RI yang ditindaklanjuti <i>Stakeholders</i>	80%
2.	Peningkatan peran Perwakilan RI dalam mendukung peningkatan pengaruh Indonesia di negara akreditasi	Persentase realisasi rencana aksi/inisiatif yang diimplementasikan	75%
3.	Peningkatan peran Perwakilan RI dalam menciptakan nilai manfaat ekonomi, dan pembangunan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia	Persentase peningkatan <i>Trade, Tourism and Investment (TTI)</i>	5%
4.	Menguatnya peran <i>soft power</i> diplomasi yang dilakukan oleh Perwakilan RI di negara akreditasi	Persentase publik di negara akreditasi yang berpandangan positif terhadap Indonesia	90%
5.	Meningkatnya pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI, serta pemberdayaan diaspora	Persentase permasalahan WNI dan BHI di luar negeri yang diselesaikan	100%
		Persentase Responden atau pengguna jasa yang menyatakan puas atas pelayanan kekonsuleran	90%
6.	Meningkatnya penerapan manajemen kinerja dan anggaran yang akuntabel	Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perwakilan yang dilakukan Itjen dan BPO	60 (CC)
		Persentase Realisasi Anggaran (SP2D) terhadap alokasi DIPA Perwakilan	95%

